

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBELI OBAT**  
**GOLONGAN DAFTAR “G” DI TOKO OBAT KOTA PADANG**

*Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di*  
*Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**OLEH:**

**Yemima Gea**

**1610112046**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)**

**Pembimbing I : Linda Elmis, S.H., M.H.**


**Pembimbing II : Neneng Oktarina S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2020**

**No. Reg. 10/PK- I/IV/2020**

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: <b>YEMIMA GEA</b>	No. Fakultas Alumni:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman /14 November 1997 b) Nama Orang Tua : Markus Gea, S.H dan Yelia Zebua c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata e) No. BP : 1610112046	f) Tanggal Lulus : 05 Desember 2020 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 4 Years 3 Month i) IPK : 3, 57 j) Alamat : Kota Sawahlunto	

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBELI OBAT GOLONGAN DAFTAR "G"  
DI TOKO OBAT KOTA PADANG  
(Yemima Gea, 1610112046, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2020)**

**ABSTRAK**

Toko obat biasanya menjadi tempat bagi konsumen membeli obat. Akan tetapi tidak semua golongan obat dapat dijual di toko obat. Toko obat hanya diperbolehkan menjual obat golongan bebas dan bebas terbatas. Hal ini diatur Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Nomor 1331/MENKES/SK/X2002. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran hukum berupa penjualan obat golongan daftar "G" di toko obat. Obat golongan daftar "G" atau biasa disebut obat keras harus dibeli berdasarkan resep dokter mengingat efek samping obat tersebut. Selain itu obat golongan daftar "G" hanya diperbolehkan dijual di apotek. Sehingga toko obat yang menjual obat golongan daftar "G" telah melanggar UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Perumusan masalah adalah ; 1) Bagaimana bentuk pengawasan dan tindak lanjut Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap penjualan obat golongan daftar G di toko obat, 2) Bagaimana hak distribusi obat yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan; 1) BBPOM mengawasi peredaran obat di toko obat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Proses pengawasan dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan penindakan. Pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Izin Toko Obat dan kelengkapan di toko obat. Sedangkan penindakan yakni melakukan penyitaan terhadap obat golongan daftar "G" dan melakukan tindakan Pro Justicia terhadap pemilik toko obat, 2) Distribusi obat diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Distribusi obat / bahan obat melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Beberapa pihak utama yang terlibat dalam CDOB adalah produsen obat, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Semua pihak diartikan tidak terbatas pada institusi yang disebutkan, namun termasuk juga pihak yang bekerjasama seperti transporter, dan lain – lain.

Kata Kunci: Toko Obat, Pengawasan, Distribusi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 14 Oktober 2020  
Penguji,


Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama	<b>Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.</b>	<b>Hj. Ulfanora, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata : **Dr.DahlilMarjon, S.H., M.H**

  
\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

No. Alumni Fakultas :	Nama: TandaTangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: TandaTangan:

	No. University Alumni:	Name of Alumni: <b>YEMIMA GEA</b>	No. Faculty Alumni:
	a) Place Of Birth	: Pariaman /14 November 1997	f) Graduate Date
	b) Name Of Parents	: Markus Gea, S.H and Yelia Zebua	g) Predicate
	c) Faculty	: Law	h) Duration Of Study
	d) Specific Program	: Civil Law	i) GPA
e) Student's Number	: 1610112046	j) Address	: Kota Sawahlunto

**CONSUMER PROTECTION OF DRUG BUYERS REGISTER "G" AT DRUG STORES  
OF PADANG CITY**

**(Yemima Gea, 1610112046, Faculty Of Law Andalas University, 88 Pages, Year 2020)**

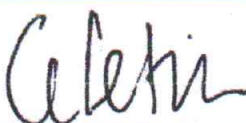
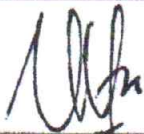
**ABSTRACT**

Drug stores are usually a place for consumers to buy drugs. However, not all drug classes can be sold at drug stores. Drug stores are only allowed to sell limited and free drugs. This is regulated in Article 1 of the Minister of Health Regulation Number 167 / KAB / B.VII / 1972 concerning Drug Retailer which has been amended into Ministerial Decree Number 1331 / MENKES / SK / X2002. However, in practice there is a violation of the law in the form of selling drugs in the "G" list at drug stores. Drugs of "G" list or so-called strong drugs must be purchased based on a doctor's prescription considering the side effects of these drugs. Apart from that, drugs of the "G" list are only allowed to be sold in pharmacies. So that drug stores that sell drugs in the "G" list have violated the Health Law and the Consumer Protection Act. The formulations of the problem are; 1) What is the form of supervision and follow-up of the Padang Food and Drug Administration (BBPOM) on the sale of class G drugs in drug stores, 2) How is the distribution of drugs properly. The research method used is juridical empirical. This research is descriptive. From the results of the research and discussion, it can be concluded; 1) BBPOM supervises the circulation of drugs in drug stores based on Regulation of the Drug and Food Control Agency Number 9 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Food and Drug Administration for 2020-2024. The supervisory process is carried out by the inspection and enforcement sector. Examination is carried out on Drug Store License and completeness at drugstores. Meanwhile, the prosecution is confiscating drugs in the "G" list and taking Pro Justicia action against drug store owners, 2) Drug distribution is regulated in Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 6 of 2020 concerning Amendments to Regulation of the Drug and Food Supervisory Agency Number 9 of the Year 2019 regarding Technical Guidelines for Good Drug Distribution. Drug distribution / drug ingredients involve several parties in it. Some of the main parties involved in CDOB are drug manufacturers, Pharmaceutical Wholesalers (PBF), Pharmacy Installations, Pharmacies, Hospitals, and Drug Stores. All parties are defined as not limited to the institutions mentioned, but including those who cooperate such as transporters, and others.

*Keywords: Drugstore, Control, Distribution*

This thesis has been retained in front of Examiner and graduated on 14 October 2020.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	<b>Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.</b>	<b>Hj. Ulfanora, S.H., M.H.</b>

Sincerely,  
Head Of Deputy Of Civil Law :**Dr.Dahlil Marjon, S.H., M.H**

  
\_\_\_\_\_  
Signature

: The Alumnus has enrolled to faculty/university and received an Alumnus number

No. Faculty Alumni :	Name:	Signature:
No. University Alumni :	Name:	Signature: